

TAJUK RENCANA

Klaster Pondok Pesantren

COVID-19 perlu disikapi secara khusus oleh kalangan pondok pesantren (Ponpes). Bahkan dalam saat tertentu, perlu ilmu dan amaliah khusus, misalnya dengan 'fiqh khusus' tentang tata cara beribadah di masa pandemi COVID-19. Sikap khusus juga perlu dilakukan oleh takmir masjid. Tata cara ibadah harus benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Dalam kondisi pandemi COVID-19, komunikasi tatap muka di lingkungan masjid dan pondok pesantren perlu dikurangi, durasi coba-bah dikurangi, waktu tadarus juga bisa dikurangi. Demikian pernah diungkapkan Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokaryan Yogyakarta, H Muhammad Jazir ASP, jauh sebelum pondok pesantren masjid menjadi klaster-klaster baru COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, menurut Jazir ASP, warga harus dibuat bahagia dan diciptakan peluang kerja, sehingga daya imun tetap terjaga. Masjid harus dijadikan tempat pencegahan, sekaligus tempat pemberdayaan umat. Harus diciptakan penanggulangan COVID-19 berbasis masjid. Pernyataan HM Jazir ini terasa sangat layak dijadikan referensi untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembinaan pondok pesantren maupun masjid. Seperti diberitakan, santri dari tiga pondok pesantren di Sleman dilaporkan telah tertular COVID-19. Kasus positif COVID-19 juga terjadi di Pondok Pesantren Al Hidayah di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Bahkan ada 328 kasus dari Klaster Ponpes ini. Kasus pondok pesantren menjadi klaster COVID-19, sebenarnya sudah terjadi di beberapa daerah, bahkan tidak hanya di

DIY dan Jawa Tengah. Tentunya ini sangat memprihatinkan, mengingat pondok pesantren adalah salah satu pusat pembinaan dan pengembangan ilmu dan *ngelmu* keagamaan maupun kemasyarakatan. Terkait kasus positif COVID-19 yang 'menjamah' pondok pesantren di Sleman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY Edhi Gunawan MPdI minta pimpinan Ponpes segera berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dari Tim Gugus Tugas COVID-19. Dengan penanganan yang serius diharapkan nantinya tidak akan ditemukan lagi penyebaran COVID-19 yang berasal dari Ponpes. Pimpinan Ponpes juga menginstruksikan kepada ponpes lain yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau sedang berproses, supaya betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Ditandaskan pula, penegakan dan kedisiplinan protokol kesehatan dalam pandemi COVID-19 harus menjadi budaya dalam kehidupan di masyarakat, termasuk pondok pesantren. Disebutkan, bahwa di DIY saat ini ada sekitar 300 pondok pesantren dan sekitar 30 Ponpes di antaranya telah melakukan pembelajaran tatap muka. Sampai akhirnya ada santri dari 3 pondok pesantren terkonfirmasi positif COVID-19. Melihat kenyataan bahwa pondok pesantren juga tidak luput dari 'incaran' virus korona, tentunya ini juga menjadi tanggungjawab bersama, pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini tidak bisa hanya ditimpakan ke pihak pondok pesantren. Kerja keras Satgas Penanganan COVID-19 dari berbagai tingkatan harus didukung oleh semua pihak dan semua lapisan masyarakat. □

'Jasmerah' dan Gaduh Sejarah

PEPATAH mengatakan 'tidak ada asap jika tidak ada api'. Tidak ada gaduh tanpa sebab. Hukum sebab akibat tampaknya harus berlaku dalam setiap kegaduhan pendidikan di negeri ini. Penyederhanaan kurikulum yang akan dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memicu kegaduhan. Matapelajaran sejarah konon akan dihapus dari struktur kurikulum nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membantah. Bantahan yang malah menjadi bagian dari kegaduhan itu sendiri. Sebagian besar yang menolak dihapusnya matapelajaran sejarah dari struktur kurikulum nasional berpendapat bahwa Mendikbud tidak mengindahkan pesan Bapak Proklamator Bung Karno: 'Jasmerah', jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Mengapa?

Ki Sugeng Subagya

tertentu. Namun demikian, suatu matapelajaran tidak akan lepas dari tujuan pendidikan nasional suatu bangsa. Jika ditarik lebih jauh lagi, matapelajaran selalu terkait dengan tujuan, misi, visi, dan filosofi suatu bangsa. Keberadaan matapelajaran dalam struktur kurikulum nasional bukan karena keinginan dan kebutuhan semata, tetapi karena urgensinya. Eksistensi matapelajaran sejarah dalam struktur kurikulum nasional tidak

peluang itu serta merta telah padam oleh bantahan Mendikbud beserta seluruh jajarannya. Bantahan yang sesungguhnya tidak sepadan dengan urgensi mata pelajaran sejarah dan perannya membangun entitas kebangsaan dan penguatan pendidikan karakter. Eksistensi dan peran matapelajaran sejarah yang sangat penting hanya disetarakan dengan jadwal pelaksanaan uji coba implementasi penyederhanaan kurikulum. Implementasi penyederhanaan kurikulum tidak akan dilaksanakan tahun ini. Uji coba terbatas akan dimulai tahun 2022 dan matapelajaran sejarah tidak dihapus. Kata Mendikbud.



**Draf Penyederhanaan**  
Eksistensi matapelajaran sejarah dalam struktur kurikulum nasional yang dinyatakan sebatas isu bocornya satu di antara sekian banyak draf penyederhanaan kurikulum adalah cara menyederhanakan persoalan dan 'lari' dari pemahaman substansial pentingnya suatu matapelajaran dalam struktur kurikulum nasional. Sederhana inilah kebangsaan Indonesia dipertaruhkan hanya karena kita tidak mampu membaca dan memahami substansi sejarah?

Sebagai bangsa kita harus kembali belajar memahami sejarah dalam ekosistem pendidikan agar anak didik mampu berpikir kritis, logis, terbuka, dan ilmiah-akademis. Termasuk di dalamnya mengkritisi sejarah bangsanya sendiri dan para pemimpinnya. Setidaknya untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah demi masa depan bangsa yang lebih baik. □

**Ki Sugeng Subagya, Pamong Tamansiswa dan Panitia Bidang Penelitian dan Pengembangan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa**

**Persyaratan Menulis**  
Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**Pikiran Pembaca**  
Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232. Fax: (0274) 563125. Telp: (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Sampah Pelindung Diri

KEADAAN dunia tenang sejenak dari aktivitas manusia, sejak pandemi COVID-19 sampai kini, namun tidak tenang bagi lingkungan karena menyisakan sampah-sampah *hardware* pelindung manusia dari pencegahan virus Korona seperti masker sekali pakai, tisu disinfektan, wadah handsanitizer, sarung tangan bahan latex, baju pelindung diri bahkan face shield, akan menjadi limbah yang mengancam. Kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk mementaskan limbah pelindung keselamatan dari COVID-19, hendaknya digabungkan, mulai dari cara membuang sampah dengan baik, mengelola sampah, kalau memungkinkan yang bisa di recycle atau daur ulang dimanfaatkan, namun tetap memperhatikan tingkat risikonya. Peduli diri tapi tidak peduli keselamatan lingkungan, masker sekali pakai sebaiknya dibuang di tempat sampah. Seringkali ditemui sampah masker sekali pakai sampai masker cuci ulang, dibuang di tempat sembarangan seperti di jalan, di semak-semak, di sungai, bahkan di toilet. Ini sungguh memprihatinkan. Limbah ini bisa menyebabkan pencemaran tanah, air bahkan bisa menyumbat saluran air, terganggunya biota sungai, bahkan sampai lautan, juga akan menjadi pemandangan yang tidak sedap. Mari kebiasaan ini dihindari, mulai saat ini membuang sampah masker ke tempat yang benar. Tidak hanya masker, termasuk limbah pelindung diri yang lain, agar

dibuang di tempat sampah. Kesadaran membuang sampah harus terus menerus disosialisasikan. Terkadang orang tidak sadar bahwa membuang sampah sembarangan bisa merugikan orang lain dan lingkungan. Ancaman pencemaran tanah terjadi. Masker, wadah disinfektan, alat pelindung diri, face shield adalah bahan-bahan yang tidak bisa terurai. Pencemaran air, apalagi kalau dibuang di sungai menyebabkan terbahatnya aliran sungai, begitu juga di toilet bisa menyumbat pipa aliran. Semprotan disinfektan juga mengotori tanah, terserap oleh tanah, bisa juga membunuh biota penyubur tanah. Pencemaran udara, semprotan disinfektan sebagian menjadi aerosol mengambang di udara, target penyemprotan adalah virus Korona, tapi dampaknya adalah hewan lain memakan tanaman, belalang, dan lain-lain. Prinsipnya droplet semprotan akan jatuh ke tanah atau tanaman. Kalau teknik penyemprotan tidak dilakukan dengan baik sesuai petunjuk protokol kesehatan maka bisa berbahaya. Ikuti Prosedur Operasi Prosedur (POS) dari dinas terkait. Demi keberlangsungan kesehatan manusia agar terhindar dari COVID-19, tetap eling, peduli dan waspada terhadap lingkungan, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dengan baik. Untuk itu kesadaran perlu dibangkitkan. □

**Eko Mulyadi MSi Guru Fisika dan Wakasek Humas SMKN 3 Yogya.**

Mengenal Rumahku, Sekolahku

ERA pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Lebih dari itu, era pandemi juga berdampak pada semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Selama era pandemi semua jenis layanan pendidikan mulai tingkat anak usia dini (PAUD), dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran dalam suasana kedaruratan. Dalam suasana kedaruratan itulah anak-anak harus belajar di rumah (*study at home*). Dampaknya, anak-anak dipaksa untuk menikmati model pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik secara daring atau luring. Pertanyaannya, siapakah pendidik terpenting selama era pandemi yang bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah konstitusi? Apalagi realitasnya hingga kini era pandemi belum menunjukkan tandak-tanda melandai. Di sejumlah daerah kasus baru COVID-19 justru meningkat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut rasanya kita bersepakat bahwa orang tua dan lingkungan keluarga merupakan pihak yang paling bertanggung jawab pada pendidikan dan pengasuhan anak. Karena itulah orang tua harus menyadari pentingnya menjadi pendidik yang terutama bagi buah hatinya. Hal itu sejalan dengan pernyataan dalam kata bijak: *al-baytu madrasah ula* (rumah adalah tempat pendidikan yang pertama).

Biyanto

juga digambarkan secara antagonis, misalnya sebagai musuh (*QS. Al-Taghabun: 14*) dan fitnah atau cobaan (*QS. Al-Taghabun: 15*). Kalam Ilahi tersebut menjadi pengingat bagi orang tua untuk berhati-hati dalam mendidik dan mengasuh anak. Jika anak-anak salah asuhan, mereka berpotensi menjadi sumber persoalan bagi orang tua. Harus diakui, selama era pandemi orang tua menjadi lebih dekat dengan buah hatinya. Bahkan banyak keluarga yang telah menyulap kondisi rumah layaknya sekolah. Mereka berprinsip: Rumahku Sekolahku (*Bayti Madrasati*). Prinsip ini penting karena dapat menjadi solusi bagi problem pendidikan anak selama era pandemi. Jika bercermin pada pemikiran Ki Hadjar Dewantara mengenai tripusat/trisentra pendidikan, institusi keluarga termasuk bagian dari tiga pilar pendidikan disamping sekolah dan masyarakat. Tetapi harus diakui, belum semua orang tua memiliki pemahaman yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak. Bahkan dalam kondisi sebelum pandemi, orang tua umumnya memasrahkan pendidikan dan pengasuhan anaknya pada sekolah semata.

ting menyadari bahwa setiap anak sesungguhnya memiliki potensi istimewa yang dianugerahkan Tuhan. Merujuk pada pandangan pakar pendidikan holistik (*holistic education*) dari The Ohio State University, Lucila T. Rudge (2012), orang tua harus mendidik buah hatinya dengan prinsip *honoring students as individuals: individual uniqueness*. Prinsip ini mengajarkan agar setiap pendidik menghayati peserta didik sebagai pribadi yang unik. Prinsi rumahku sekolahku juga meniscayakan orang tua benar-benar hadir sepenuhnya sebagai pendidik (murabbi). Bukan sekedar mentransfer pengetahuan dan keterampilan, orang tua juga harus menjadi sumber keteladanan bagi buah hatinya. Hal itu penting karena di tengah era disrupsi pendidikan anak-anak sering kehilangan sosok yang pantas dijadikan model keteladanan. □

**Prof Dr Biyanto, Guru Besar Filsafat UIN Sunan Ampel, Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)**

**Pojok KR**  
Kepala Kanwil Kemenag DIY minta Ponpes perketat protokol kesehatan.  
**-- Ketat dan kuat.**  
\*\*\*  
Cegah penyebaran COVID-19, kampanye Pilkada lewat media massa harus diperbanyak.  
**-- Catat itu!**  
\*\*\*  
Asita DIY ciptakan skenario bisnis adaptif pandemi terhadap COVID-19.  
**-- Hanya skenario?**  
*Berabe*

**Kedaulatan Rakyat**  
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.  
**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax: (0274) - 563125, Telp: (0274) - 565685 (Hunting) (Hunting)  
**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp: (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio :** KR Radio 107.2 FM.  
**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.  
**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp: (021) 8563602/Fax: (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
**Wartawan :** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp: (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp: (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.  
**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp: (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.  
**Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp: (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.  
**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp: (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.  
**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp: (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.